

## ***Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro**

**Emily Aurellia<sup>1\*</sup>, Ahmad Taufiq<sup>2</sup>, Sri Kasiami<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bojonegoro, Jl. Lettu Suyitno No.2 Glendeng Kalirejo, Bojonegoro dan 62119

Corresponding Author: [emilyaurellia13@gmail.com](mailto:emilyaurellia13@gmail.com), [taufiq.alfazka@gmail.com](mailto:taufiq.alfazka@gmail.com), [sri.kasiami@gmail.com](mailto:sri.kasiami@gmail.com)

Received 20 Dember 2023 ☐ Revised 28 Desember 2023 ☐ Accepted 30 Desember 2023

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the cooperation beetwen stakeholders under the leadership of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) in Gedongarum village, Kanor district, Bojonegoro local government. The study uses a descriptive method with a qualitative focus. This theory used in this research is according to Ansell & Gash (2008) with main indicator, namely : starting condition, institutional planning, enabling leadership and collaboration processes. This result of research show that the collaboration carried out in the management of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) is very well established and stakeholders can build a sense of competitive trust and have strong commintment to developing each program owned by each actor in accordance with goals of the collaboration. Which has been mutually agreed upon.*

*Keyword : Collaboration Governance, Management, Water User farmers Assosiation*

### **INTRODUCTION/PENDAHULUAN**

Pemerintah adalah bagian terpenting dalam membangun sebuah negara, sehingga pemerintah sangat berperan aktif dalam semua masalah politik, ekonomi, pembangunan, sosial, hukum serta untuk kepentingan masyarakat. Konsep Good Governance terdapat 3 faktor utama yaitu Government, Civil Society, Confidential Sector yang saling berhubungan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing (Iii, 2010). Dalam mengelola suatu pemerintahan harus disesuaikan dengan perannya atas dasar tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah seringkali melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya agar dapat mencapai tujuan pelaksanaan program-program pemerintah (Udayana, 2020).

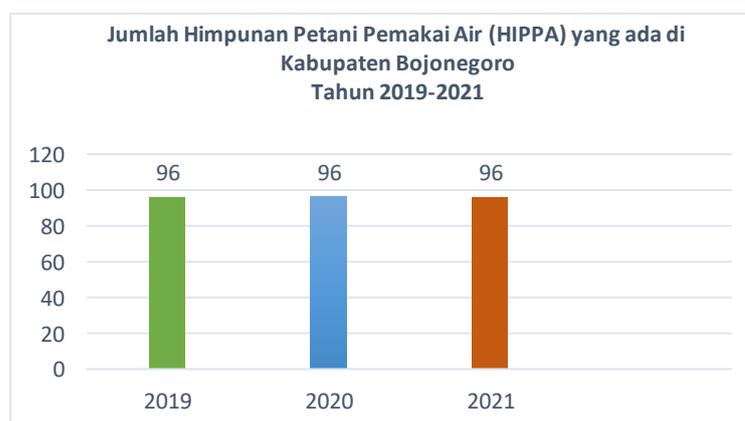
Kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat ini merupakan bagian dari kemitraan yang di dasari oleh kepentingan pemerintah dalam segala bentuk kegiatan masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat yang mandiri sera inovatif. Pada masa revolusi industri 4.0 kolaborasi merupakan salah satu kekuatan dalam perkembangan saat ini (Molla et al., 2021), dikarenakan telah terjadi perubahan kondisi dengan tujuan yang diinginkan. Dimana hasil yang diinginkan akan tercapai dengan adanya kerjasama para pemangku kepentingan untuk menangani dan menyesuaikan perubahan kondisi yang ada. *Collaborative Governance* ini terlaksana akibat adanya pemerintah ikut terlibat dalam kerjasama antar para aktor stakeholder.

Pemerintahan kolaboratif adalah salah satu acuan dalam proses pemerintah. Hal ini dilihat dari kerjasama pemerintah dengan para stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Keikutsertaan pihak non-pemerintah dalam pemerintahan akan sangat menguntungkan bagi tata kelola pemerintah yang ada dari segi anggaran serta inovasi (Sururi et

al., 2018), terutama melalui kerjasama yang konsisten (Astuti, 2020) . Hal ini penting karena keterlibatan beragam komponen dalam pemerintahan yang baik akan menghasilkan kreatifitas baru dan tanggung jawab bersama untuk mengelola pemerintahan yang baik (Irawan, 2016). Ada kemungkinan bahwa kerja sama pemerintahan ini akan menjadi model yang dapat diterapkan dengan sukses dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi. Jadi, *Collaborative governance* adalah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai level, termasuk instansi publik, swasta, dan masyarakat sipil (Novita et al., 2018). Para stakeholder bekerja sama dalam memperoleh tujuan publik yang ingin dicapai oleh para stakeholder terkait (Fatman et al., 2023).

Dengan mayoritas penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani, pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi pangan yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan meningkatkan produksi pertanian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin menjadi lumbung padi nasional dengan membangun prasarana jaringan irigasi dengan mendukung Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). HIPPA adalah sebuah asosiasi pengelolaan irigasi yang dibuat oleh petani yang menggunakan air secara demokratis untuk membantu dan mengatur proses penyaluran air dengan aturan yang berkembang di daerah (A. D. Lestari, 2019). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 adalah landasan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengelola sumber daya air khusus irigasi pertanian. Fungsi utama kebijakan ini adalah penyediaan air dengan biaya relatif rendah serta memiliki kualitas tinggi ini akan diberikan kepada penggunaannya. Hal ini memungkinkan bahwa masyarakat petani selalu bergantung pada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berusaha membuat inisiatif dan program yang sesuai dengan undang-undang untuk mengelola sumber daya air, terutama irigasi pertanian (Publik et al., 2009).

**Tabel. 1 Jumlah Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2019-2021**



**Sumber : (Dinas PU Sumber Daya Air, 2021)**

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlah Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) itu tetap tidak ada penambahan yaitu sebanyak 96 kelompok dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel. 2 Perincian HIPPA se-Kabupaten Bojonegoro**

No	Kecamatan	Jumlah (Unit) HIPPA
1.	Dander	10
2.	Padangan	9
3.	Malo	8
4.	Ngraho	7
5.	Gondang	6
6.	Balen dan Trucuk	5
7.	Baureno, Gayam, Kalitidu, Kedungadem, Kepohbaru dan Sumberrejo	4
8.	Bojonegoro dan Kapas	3
9.	Bubulan, Kanor, Kasiman, Kedewan, Tambakrejo dan Temayang	2
10	Margomulyo, Sekar, Sugihwaras dan Sukosewu	1
<b>Total HIPPA</b>		96 Kelompok

**Sumber : (Dinas PU Sumber Daya Air, 2021)**

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi alamiah khususnya air di Kabupaten Bojonegoro menjadi aset yang sangat berharga untuk pengembangan pemerintah daerahnya. Masing-masing daerah memiliki potensi yang sangat besar dan jika dikembangkan akan berdampak baik bagi perekonomian serta pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu desa yang memiliki aset dan penghasilan yang cukup melimpah yaitu Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yang mempunyai program Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Dengan adanya program Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Jaya Tirta ini mampu yang berdampak pada Indeks Pertanian (IP) meningkat. Dalam sistem pompanisasi yang ada di Desa Gedongarum ini terdapat 5 sanyo yang ada di pompa induk, 40 pompa imbalan di sawah dan 3 sanyo di sawah. Dengan pembagian sistem 5 orang mengoperasikan khusus pompa induk, pembagian pintu air yang dikelola 3 koordinator dari HIPPA.

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Jaya Tirta Desa Gedongarum ini merupakan HIPPA terbaik di Kabupaten Bojonegoro dan pernah menjadi perwakilan dari Bakorwil Bojonegoro untuk Perlombaan HIPPA tingkat Provinsi Jawa Timur dan berhasil meraih juara 3. Salah satu faktor yang menjadikan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ini terbaik se Bojonegoro adalah Hasil panen padi yang diatas rata-rata nasional yakni sebanyak 10-14 ton/ha. Sistem pompanisasi yang dilakukan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mampu mengairi 505 hektar sawah di Desa Gedongarum. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi menjadi 10-14 ton/ha dengan Indeks Pertanaman (IP) 200-300 disesuaikan dengan iklim. Sebelum adanya sistem pompanisasi ini, para petani hanya bisa penanaman padi 1 kali dalam setahun dengan mendapat produksi dibawah 6 ton/ha Gabah Kering Panen (GKP). Tetapi setelah adanya sistem pompanisasi ini petani melakukan penanaman padi sebanyak 2-3 kali dalam setahun produktivitas mencapai 12 sampai 14 ton/ha dengan menggunakan varietas padi Ciherang. Pada saat musim kemarau hasil panen yang ada di Desa Gedongarum ini lebih maksimal karena Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ini mampu mengelola air dari bengawan solo dengan baik sehingga Desa Gedongarum ini memiliki air yang banyak untuk membantu pengairan sawah.

Dengan adanya pengelolaan yang baik serta kolaborasi yang berjalan dengan baik antara HIPPA dengan Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tokoh masyarakat, kelompok tani yang ada di Desa Gedongarum inilah yang membuat peningkatan rata-rata produktivitas hasil padi melampaui rata-rata nasional dibandingkan dengan desa lainnya, sehingga membuat Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) menjadi yang terbaik se Kabupaten Bojonegoro. (*HIPPA Jaya Tirta Contoh Sukses Pengelolaan Irigasi Oleh Petani - FAJAR*, n.d.). Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan irigasi dapat dicapai melalui peningkatan peran lembaga pengelola irigasi dan pemangku kepentingan tergabung dalam wadah Himpunan Petani Pengelola Air (HIPPA), yang otonom, mandiri, dan mengakar pada masyarakat. Perubahan paradigma ini diharapkan akan memberikan petani yang tergabung dalam lembaga pengelola irigasi atau HIPPA lebih banyak kemampuan untuk melakukan apa yang mereka inginkan untuk mewujudkan sistem irigasi yang berkelanjutan (Soejono et al., 2023).

Bedasarkan hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh (Pradana, 2022), mengatakan bahwa HIPPA ini memberikan manfaat pada masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan. Namun dari segi partisipatif dari para pengurus HIPPA belum dilaksanakan secara maksimal (Yelvita, 2022). Begitupun menurut (Ernawati, 2018), menyebutkan kolaborasi yang dijalankan antar stakeholder sudah efektif walaupun tidak terlibat secara langsung dalam memberikan penyaluran bantuan. Disamping hal itu pengurus HIPPA tidak berpartisipasi secara aktif sehingga membuat kolaborasi ini kurang optimal (Pendapatan & Dan, 2017). Untuk menjadi pengelola air irigasi yang mandiri, koordinasi antara lembaga lokal penting (Amin, 2015), mengatakan interaksi antara GHIPPA dan HIPPA masih tidak optimal dan kurang intens karena para stakeholder lebih berfokus kepada operasi nya masing-masing.

Dari hasil penelitian terdahulu dilakukan penelitian lanjutan dengan kebaharuan penelitian dari Pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang masih menghadapi beberapa permasalahan yang timbul dari segi partisipatif, komitmen bersama dll dengan menggunakan model Collaborative Governance diharapkan mampu untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder untuk melakukan kolaborasi sesuai

dengan tujuan kolaborasi ini dibentuk. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat salah satu bentuk praktik kolaborasi yang terjadi antara Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan para stakeholder yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintah Desa, Kelompok Tani, Dinas Pertanian serta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Dengan adanya kolaborasi yang dibentuk dalam pengelolaan HIPPA ini diharapkan setiap komponen terlibat dalam proses pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa akan lebih akomodatif terhadap aspirasi dan masukan dari para stakeholders. Dengan menggunakan collaborative governance terkait pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang ada di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini diharapkan akan memudahkan tindakan kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder terkait dalam memfasilitasi, mengedukasi, dan mendampingi pengelolaan HIPPA tersebut sehingga mencapai keberhasilan aksesibilitas dan peningkatan perekonomian yang ada di Desa Gedongarum. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terciptanya kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan terhadap Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagai suatu program yang berkelanjutan bagi masyarakat serta para stakeholder yang terkait.

### **Method/METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, karena data penelitian yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat untuk memperoleh kedalaman data agar dapat mengungkapkan kondisi umum yang sesuai dengan penelitian. (Sugiyono 2017:9) dalam penelitian kualitatif ini berbasis pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, dan menggunakan instrumen kunci untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang terciptanya kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan terhadap Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penerapan metode yang digunakan berdasarkan studi lapangan yang dilakukan secara langsung terjun ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori Kolaborasi Ansel dan Gash (2008) yang digunakan ini untuk mengetahui keterikatan antara aktor stakeholder satu dengan yang lainnya hingga timbul suatu kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam kolaborasi yang dibangun secara bersama-sama.

### **Results And Discussion/HASIL DAN DISKUSI**

Hasil dari penelitian terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini akan dijelaskan dengan menggunakan indikator collaborative governance yang dikutip dari teori Ansell & Gash (2008) yang meliputi *Starting condition* (Kondisi Awal), *Institutional Design* (Desain Kelembagaan), *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif), *collaboration process* (Proses Kolaborasi) yang dipaparkan sebagai berikut :

#### **Starting Condition (Kondisi Awal)**

Kondisi awal ini merupakan tahap pertama dalam memulai sebuah kerjasama sampai ke proses terjalannya suatu kolaborasi antar para aktor stakeholder. Menurut Ansel & Gash (2008) terdapat 3 indikator yang dapat mempengaruhi kondisi awal yaitu, kurangnya sumber daya dan pengetahuan para pemangku kepentingan, terdapat aspek motivasi dalam berpartisipasi, dan

kekhawatiran akan timbulnya konflik dalam kolaborasi (Eka et al., 2023). Dalam penelitian ini, faktor insentif (Kota et al., n.d.) yang membuat para pemangku kepentingan terlibat dalam proses kolaborasi ini bermula dengan adanya potensi yang muncul dari hasil pengelolaan usaha irigasi atau pompanisasi yang dikelola oleh HIPPA sangat berpengaruh besar pada Pendapatan Asli Desa (PADes) jika dikelola dengan baik dan secara terstruktur. Sehingga hal ini menarik minat perhatian para pemangku kepentingan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak HIPPA untuk melakukan pengelolaan terhadap usaha irigasi atau pompanisasi tersebut.

Pada tahun 2004 ada beberapa pemilik modal (pengusaha) melihat adanya potensi yang melimpah di desa Gedongarum yaitu salah satunya sistem irigasi yang dilihat dari para penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani. Sehingga, para pengusaha ini memanfaatkan potensi yang ada dengan mengelola sebuah organisasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam upaya menjalankan usaha pompanisasi atau irigasi untuk meningkatkan pertanian yang ada di Desa Gedongarum. Dalam proses pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air ini diambil alih oleh para pengusaha yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa menyadari bahwa masyarakat kurang mendapatkan keuntungan dari hasil yang didapat dikarenakan salah satu faktor yaitu kurangnya pembagian air yang kurang merata. Hal ini yang membuat pemerintah desa berusaha untuk membantu mengambil alih kepengelolaannya agar bisa dikelola sendiri dengan keuntungan akan lebih banyak di dapatkan dan berusaha secara maksimal mungkin agar dapat mengelola usaha desa tersebut dengan baik.

Kolaborasi yang dijalankan oleh pengurus organisasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan para aktor kolaborasi ini dapat memberikan insentif kepada semua pihak yang terlibat yaitu bagi pemerintah desa Gedongarum keuntungan yang didapat adalah terbantunya urusan pemerintahan dalam membantu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang terbukti meningkat secara besar akibat adanya pengelolaan sistem pompanisasi ini, selain itu juga pada bidang pertanian dimana Pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ini mengatur irigasi secara efektif serta efisien untuk mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Soejono et al., 2023). Sementara itu, keuntungan yang didapat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah desa untuk membantu pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sehingga mampu memperluas jaringan yang ada. Selain itu BUMDesa juga mendapat pemasukan hasil dari pengelolaan sistem pompanisasi atau irigasi tersebut dengan pembagian yang merata. Kemudian, bagi pihak kelompok tani ini mendapat keuntungan terkait ketersediaan air yang cukup berlimbah untuk mengatur pola tanam sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang berlimbah. Selanjutnya, bagi Dinas Pertanian mendapat keuntungan sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan pembinaan para petani dalam hal teknik budidaya tanaman, cara penanganan hama sebelum dipanen. Jadi hal ini memudahkan pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam meningkatkan produktivitas hasil panen dan peningkatan pendapatan usaha tani. Dan yang terakhir bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) mendapat kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengembangkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam bidang teknis, pengoperasian, pelestarian serta tata kelola organisasi. Tidak heran jika Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gedongarum ini berhasil mendapatkan pendapatan paling besar se Kabupaten Bojonegoro dan mewakili lomba HIPPA di Provinsi Jawa Timur dan meraih juara 3.

### ***Institutional Design (Desain Kelembagaan)***

Ketetapan aturan dan metode yang diambil dapat diartikan sebagai salah satu aspek utama dalam kolaborasi ini (Wijaya et al., 2022). Dengan adanya peraturan yang terbuka dan adil ini akan meyakinkan para stakeholder bahwa setiap persetujuan yang dibuat ini untuk mencapai kepentingan bersama yang didasarkan pada peraturan yang ada. Kolaborasi yang terbangun dalam pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ini didasarkan pada hubungan kepercayaan dan kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kolaborasi ini para pemangku kepentingan melakukan interaksi melalui rapat formal maupun non formal untuk membuat sebuah aturan yang akan disepakati. Hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan lembaga-lembaga yang mengelola HIPPA dan pengangkatan pengurus inti dari HIPPA yang tertuang dalam Surat Keputusan Desa Gedongarum. Selain itu untuk memfasilitasi pengelolaan HIPPA ini melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Tirta selaras dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Bab 1 Pasal 1. Dalam hal ini regulasi berpengaruh sangat penting karena merupakan kewenangan yang di dapatkan dari organisasi untuk mengelola dan mengatur kegiatan yang ada di wilayah badan hukumnya. Sehingga BUMDes dan Pengurus HIPPA adalah organisasi pengelola yang diberikan tugas dalam melakukan pengelolaan terhadap HIPPA.

### ***Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)***

Kepemimpinan fasilitatif diartikan sebagai salah satu faktor utama untuk mencapai keberhasilan dalam proses kolaborasi, hal ini dikarenakan seorang pemimpin fasilitatif ini harus mampu membawa para stakeholders bersama-sama untuk melakukan sebuah pertemuan dengan membangun sebuah rasa saling percaya dan membuat semua aktor berkomitmen terkait program satu sama lain dalam semangat kolaborasi sesuai dengan tujuan bersama yang telah disepakati (R. M. Lestari & Farahnisa, 2020) Dalam kaitannya Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi terhadap pengelolaan HIPPA di Desa Gedongarum yang dilakukan oleh pengurus HIPPA ini sudah berjalan secara optimal, karena pelaksanaan forum pertemuan yang diadakan sekali dalam setiap bulan secara rutin. Dengan adanya musyawarah pengelolaan HIPPA di Desa Gedongarum, camat Kecamatan Kanor yang bisa disebut sebagai seorang pemimpin yang fasilitatif, mengingat peran camat yang begitu penting dalam hal mendorong dan mempengaruhi pihak terkait baik di tingkat desa (Kepala desa Gedongarum, HIPPA, BUMDes, UPTD, Lembaga Keuangan) maupun kabupaten (Bupati atau Dinas terkait) untuk memberikan dukungan kepada program usaha pompanisasi yang dikelola oleh HIPPA.

Selain camat Kecamatan Kanor, para pengurus HIPPA juga memiliki peran aktif yaitu selalu terbuka dalam setiap masukan dari para stakeholders lainnya dan siap untuk melakukan perbaikan jika ada sesuatu masalah dengan melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun (Negara & Makassar, n.d.). Kemudian, Kepala desa juga menjadi salah satu tokoh utama pemimpin fasilitatif dalam pengelolaan HIPPA ini karena memfasilitasi ruang kepada para pemangku kepentingan pada saat melakukan sebuah musyawarah dan juga kepala Desa Gedongarum ini juga bisa dikatakan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten, swasta maupun masyarakat hal inilah yang mendorong kepala desa untuk selalu ikut terlibat aktif dalam setiap pengelolaan HIPPA. Jadi kepemimpinan bisa dikatakan sebagai aktifitas untuk dapat mempengaruhi orang lain, jika dilihat Bapak Camat Kecamatan Kanor dan Kepala Desa Gedongarum yang mampu mempengaruhi para stakeholder untuk mendukung program usaha ini dan selalu terbuka dalam setiap mengambil keputusan demi kepentingan bersama sehingga dengan adanya

kepemimpinan terbuka seperti ini bisa mengantarkan HIPPA ini menjadi terbaik se Kabupaten Bojonegoro.

Dalam proses kolaborasi ini terdapat 5 sub indikator utama yakni *Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)*, *Trust Building (Membangun Kepercayaan)*, *Commitment to the Process (Komitmen Terhadap Proses)*, *Shared Understanding (Pemahaman Bersama)* dan *Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)* akan dijelaskan sebagai berikut :

### ***Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)***

Salah satu jenis proses kolaboratif adalah dialog tatap muka, yang dibangun berdasarkan pertemuan langsung antar para stakeholder yang melibatkan semua pihak yang berpartisipasi dalam prosedur pembuatan keputusan dengan fokus pada kepentingan bersama. Pada proses dialog tatap muka ini dilakukan pastinya akan timbul suatu perbedaan pendapat atau pandangan dari masing-masing stakeholders. Jadi dengan adanya dialog tatap muka ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi peluang yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keuntungan dalam proses kolaborasi ini sehingga dapat membangun sebuah kolaborasi yang efektif untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.

Pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang ada di Desa Gedongarum ini terdapat para pemangku kepentingan ikut terlibat aktif pada saat dialog tatap muka yang dilakukan Pengurus HIPPA dengan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang terjalin interaksi sangat baik pada saat melakukan musyawarah. Program pompanisasi atau irigasi merupakan salah satu program yang dikelola oleh HIPPA. Hal ini diawali dengan adanya musyawarah atau forum tatap muka antar para pemangku kepentingan melalui proses pemetaan desa yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pengembangan pengelolaan usaha pompanisasi tersebut. Setelah dimusyawarahkan sekaligus penetapan bahwa yang ikut dalam pengguna program irigasi tersebut selain Desa Gedongarum adalah Desa Temu dengan 360 hektar yang dikelola oleh HIPPA, sedangkan di Desa Gedongarum sendiri sebanyak 560 hektar. Kemudian, setelah selesai melakukan pemetaan dilanjutkan dengan forum tatap muka dan membangun kesepakatan antara Para pemangku kepentingan dengan Desa Temu. Selain itu Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta HIPPA mengadakan forum formal yaitu musyawarah desa yang dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Musyawarah ini membahas kinerja BUMDes dan HIPPA Jaya Tirta pada satu periode tanam. Dalam forum ini pemerintah Desa beserta BUMDes dan HIPPA melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak semua masyarakat mengikuti forum ini hanya beberapa perwakilan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili dalam partisipasi forum tersebut.

Selain Musyawarah Desa yang dilakukan, pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) terkait dengan program usaha pompanisasi atau irigasi, bahwa dalam dialog tatap muka antar para stakeholder ini juga dapat berupa sosialisasi ataupun pelatihan. Sosialisasi atau pelatihan dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder terkait dan disesuaikan dengan tugas-tugas nya agar manfaat atau hasilnya ini terselenggara serta telaksana dengan baik kepada masyarakat. Pelaksanaan proses kolaborasi dalam dialog tatap muka ini terlihat saling melengkapi antara para stakeholder terkait. Dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan ini akan memudahkan interaksi dan komunikasi anatar sesama para stakeholder dengan

masyarakat untuk mendukung satu sama lain agar dapat mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan serta pengembangan HIPPA dengan menggunakan program pompanisasi tersebut. Sosialisasi dan Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan antar para pemangku kepentingan, dilihat dari keseriusan para satekholders dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun para pengelola usaha tersebut dan terlihat antusiasme masyarakat setaia ada sosialisasi ataupun pelatihan yang diadakan selalu ikut terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Sosialisasi dan pelatihan juga dilaksanakan oleh pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta para pemangku kepentingan ini terdapat satu forum bersama yang dilakukan secara formal maupun non formal untuk mampu menyampaikan kegiatan ataupun kendala yang ada sehingga perlu diselesaikan secara bersama-sama agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dan tumpang tindih kepentingan antar stakeholder (Mirza et al., 2017). Peran masing-masing antar para pemangku kepentingan dalam dialog tatap muka ini sangat penting bagi pengelolaan HIPPA kedepannya agar program usaha pompanisasi yang dikelola ini dapat berkelanjutan dan berjalan secara efektif (Governance Dalam Devi Arianti dan Lena Satlita & Arianti dan Lena Satlita, 2019).

### ***Trust Building (Membangun Kepercayaan)***

Dalam sebuah kerjasama lebih dari negosiasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai kepentingan bersama, tetapi untuk membentuk sebuah rasa saling percaya antar para stakeholder agar dapat mencapai kepentingan bersama (Susukan et al., n.d.). Kepercayaan merupakan kunci dalam sebuah kerjasama dimana rasa saling percaya yang muncul ini harus sesuai dengan hubungan profesional karena harus bisa meyakinkan rekan kerja yang akan ikut bergabung dalam sebuah kolaborasi untuk mendukung suatu program yang akan dijalankan. Seluruh pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dilaksanakan secara terbuka dan transparan merupakan salah satu metode untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, pemerintah desa terhadap pengurus HIPPA atas pengelolaan program usaha pompanisasi atau irigasi. Selain itu jika ada kendala atau masalah, masyarakat bisa mempercayakannya kepada pengurus HIPPA untuk membantu mencari solusi dan menyelesaikan atas masalah yang terjadi. Jika ada kendala atau masalah masyarakat akan berkomunikasi dengan para pengurus HIPPA dan masalah tersebut akan diselesaikan ditingkat para pengurus HIPPA terlebih dahulu, apabila belum menemukan titik terang di antara pengurus HIPPA maka akan dibawa ke tingkat Desa bersama dengan para stakeholder terkait.

Dalam pernyataan diatas terlihat bahwa untuk membangun suatu kepercayaan dengan para stakeholder dalam sebuah kolaborasi ini harus dimulai dari diri sendiri dengan menjaga komitmen antara apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka dengan adanya komitmen itu bisa menumbuhkan kepercayaan dalam diri sendiri. Kepercayaan yang dibangun dalam pengelolaan HIPPA ini terkait program usaha pompanisasi atau irigasi ini melibatkan semua pihak stakeholder terkait dalam setiap pengambilan keputusan dalam musyawarah agar pengelolaannya berjalan secara tersusun sehingga wajar saja jika dalam pengelolaan HIPPA ini menjadi terbaik se-Bojonegoro karena dalam sistem pengelolaannya yang transparan, akuntabel, tertib anggaran yang dikelola dan program yang dijalankan ini membantu kebutuhan masyarakat di bagian Pertanian sehingga mampu memberikan pengairan yang cukup baik hingga mendapat hasil yang sangat tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa proses kerjasama untuk membangun kepercayaan ini sudah terjalin dengan baik. Para

pemangku kepentingan lebih berfikir secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk pengambilan suatu keputusan dalam menangani sebuah masalah yang muncul sehingga program-programnya dapat berhasil.

### ***Commitmen to the Process (Komitmen terhadap Proses)***

Komitmen sangat penting untuk pelaksanaan kolaborasi yang dilandasi unsur saling keterikatan antar para pemangku kepentingan dalam upaya menangani setiap masalah. Dalam pembangunan komitmen ini telah diawali dengan dialog tatap muka yang dilakukan oleh aktor-aktor dengan cara bermusyawarah dengan transparan sehingga para aktor akan lebih berkomitmen dalam suatu kolaborasi yang dijalankan. Jadi baik buruknya hasil yang dicapai dalam sebuah kolaborasi ini bergantung pada komitmen yang dibangun secara kolektif antar para pemangku kepentingan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Proses kolaborasi yang berkaitan dengan pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini dimulai dengan kebutuhan semua pihak yang berkolaborasi untuk melakukan hal yang sama. Para stakeholder terutama pengurus HIPPA yang memiliki wewenang dalam penyaluran program irigasi yang dijalankan dengan melakukan koordinasi dengan BUMDes, Kelompok Tani, Pemerintah Desa, Dinas PMD, dan Dinas Pertanian membangun kerjasama yang baik agar semua mendapat keuntungan dalam kolaborasi ini. Bentuk komitmen terhadap proses yang ditunjukkan oleh pengurus HIPPA dalam melakukan pengelolaan ini yaitu dengan melibatkan semua aktor sekaligus para petani yang terlibat dalam program usaha pompanisasi yang dikelola oleh HIPPA. Para petani ikut terlibat aktif dalam sistem kolaborasi ini, partisipasi yang dilakukan oleh para petani ini sangat terlihat dengan mendukung setiap program yang dikelola oleh HIPPA. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ini komitmen yang diberikan berjalan dengan baik dan para aktor-aktornya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya demi kepentingan bersama.

### ***Shared Understanding (Pemahaman Bersama)***

(Ansell & Gash, 2008) berpendapat bahwa dengan diadakannya sebuah kerjasama ini para pemangku kepentingan ini harus mempunyai kesepahaman yang sama mengenai visi, misi yang jelas dan penyelarasan dalam inti masalah. Dalam konsep pemahaman bersama ini digunakan untuk mengambil keputusan atau kesepakatan yang digunakan untuk menangani sebuah masalah yang muncul (Hadilinatih, 2018). Pada pelaksanaan pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ini para pemangku kepentingan sudah mengerti akan visi dan misi diadakannya kolaborasi sehingga, para stakeholder menyetujui setiap keputusan yang diambil dan sekaligus muncul sikap partisipasi dalam setiap hal apapun yang berkaitan dengan Program pengelolaan HIPPA yang ada di desa Gedongarum. Dalam penelitian ini, bahwa dalam pengelolaan HIPPA ini sudah optimal yang dilihat dari pemahaman para aktor kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu para aktor juga memahami program yang dijalankan oleh aktor terkait dalam melakukan pengelolaan HIPPA. Sehingga mengakibatkan adanya program yang diadakan sangat sesuai dengan kebutuhan para masyarakat sehingga lebih mudah dalam melakukan koordinasi antara satu lain.

### ***Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)***

*Collaborative Governance* dalam pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) terkait dengan program usaha pompanisasi atau irigasi yaitu untuk meningkatkan kualitas dari

organisasi HIPPA yang diharapkan mampu memperluas program tersebut karena dengan adanya kolaborasi dari pihak Dinas akan membantu untuk manajemennya secara lebih terstruktur sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari tahun ke tahun. Selain itu diadakannya kolaborasi ini untuk membantu masyarakat untuk menyalurkan air ke lahan-lahan para petani dengan menggunakan sistem pompanisasi yang dikelola oleh HIPPA mengingat Desa Gedongarum ini salah satu desa yang mempunyai lahan pertanian paling banyak yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan lebih bisa meningkatkan pengelolaan HIPPA agar lebih efektif dan efisien melalui sistem program usaha pompanisasi atau irigasi di Desa Gedongraum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Tanpa adanya kolaborasi ini, pihak terkait tidak akan dapat menjadi salah satu HIPPA terbaik se Kabupaten Bojonegoro dan mampu mewakili lomba HIPPA di tingkat provinsi yang meperoleh juara 3 HIPPA terbaik Se Jawa Timur.

### CONCLUSION/KESIMPULAN

Proses kolaborasi ini sangat penting dan berpengaruh dalam pengelolaan HIPPA karena meskipun para pengurus HIPPA ini mampu mengelola organisasi serta program yang ada, tetapi tanpa dukungan dari stakeholder secara keseluruhan maka proses pengelolaan HIPPA ini tidak akan berjalan secara efektif dan hasil dari program tersebut tidak dapat dirasakan. Jadi, berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap collaborative governance dalam pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gedongarum yang melibatkan beberapa para pemangku kepentingan diantaranya Pemerintah Desa, BUMDes, Kelompok Tani, Dinas PMD, dan Dinas Pertanian beserta masyarakat telah berjalan sangat baik dan secara optimal sesuai dengan tujuan utamanya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari berjalannya proses kolaborasi yang sudah dijalankan sangat baik oleh stakeholder terkait sehingga mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, dilihat dengan adanya dialog tatap muka melalui forum pertemuan yang diadakan secara formal maupun non formal ini mampu menumbuhkan kepercayaan serta komitmen dari para pemangku kepentingan cukup tinggi yang dapat mempermudah dalam musyawarah pada saat proses pengambilan keputusan. Namun, tidak semua masyarakat mengikuti forum ini sehingga berdampak kurang maksimalnya ruang masukan dari masyarakat terhadap proses kolaborasi yang dijalankan. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif yang ada dalam proses kolaborasi ini juga sudah berjalan optimal karena pelaksanaan forum pertemuan dilakukan secara rutin dalam sebulan sekali yang mengakibatkan keterikatan antar stakeholder dalam collaborative governance ini sangat berperan penting terhadap keberlanjutan pengelolaan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) agar dapat terus meningkatkan manajemen stakeholder yang baik.

### REFERENSI

- Amin, T. (2015). Disain Kelembagaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Situbondo. *Tesis*, 1-176.
- Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Dinas Kesehatan. (2021). Satu Data Bojonegoro. In *Satu Data Bojonegoro*.  
<https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kesehatan.html@detail=morbiditas>
- Eka, N., Setiawandari, P., Kriswibowo Prodi, A., Publik, A., Veteran, U., Timur, J., & Koresponden, S. \*. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance in Waste Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149-155.  
<https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>

- Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance Di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 120–134. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10515>
- Governance Dalam Devi Arianti dan Lena Satlita, C., & Arianti dan Lena Satlita, D. (2019). *The Collaborative Governance on the Development of Mangrove Baros Conservation in the Village of Tirtohargo Kretek District Bantul Regency*. 19.
- Hadilinatih, B. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN KORUPS*. 2(1), 1–12.
- HIPPA Jaya Tirta Contoh Sukses Pengelolaan Irigasi Oleh Petani - FAJAR*. (n.d.).
- Iii, B. A. B. (2010). *We have become a society of organization" they surround us. We are born in them and usually die in them. Our life space between is filled with them. They are just about impossible to escape. Organization are as inevitable a death and tax. They adsorbed so*. 56–94.
- Irawan, D. (2016). *( Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya )*. 1–11.
- Kota, D. I., Provinsi, T., & Utara, K. (n.d.). *Pengelolaan sampah berbasis*. 247–260.
- Lestari, A. D. (2019). Model Pemberdayaan Petani Melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirta Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dalam Mewujudkan Lumbung Pangan Negeri di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(5).
- Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). *Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu*. 2(3), 225–239.
- Mirza, R., Universitas, D., & Mada, G. (2017). *Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour*. 44(June), 43–54.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Negara, I. A., & Makassar, U. M. (n.d.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAJO*. 2.
- Novita, A. A., Brawijaya, U., & Timur, J. (2018). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP ) Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan*. 4(1), 27–35.
- Pendapatan, A., & Dan, P. (2017). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2009). *Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 dalam perspektif*. 1(4), 83–90.
- Soejono, D., Zahrosa, D. B., Maharani, A. D., & Sari, S. (2023). Pola Interelasi Dan Pengembangan Himpunan Petani Pemakai Air (Hipaa) Di Wilayah Pedesaan Jawa Timur. *Agribios*, 21(1), 82. <https://doi.org/10.36841/agribios.v21i1.2846>
- Sururi, A., Ilmu, F., & Raya, U. S. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI INOVASI KEBIJAKAN STRATEGIS ( STUDI REVITALISASI KAWASAN WISATA CAGAR BUDAYA BANTEN LAMA )*. 25(1).
- Susukan, K., Semarang, K., Diah, A., Utami, M., Hariani, D., & Sulandari, S. (n.d.). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul ,.*
- Udayana, U. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR Putu Nomy Yasintha*. 4(1), 1–23.

Wijaya, A., Fasa, H., & Berliandaldo, M. (2022). (*SUSTAINABLE GEOTOURISM MANAGEMENT FOR SUPPORTING THE CONSERVATION OF GEOLOGICAL HERITAGE* : 79–97.

Yelvita, F. S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dewarejo Di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). In *γ787* (Issue 8.5.2017).